Sosialasi Anti Rasuah Dan Dampak Rasuah di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu di Tinjau dari Sudut Pandang Ekonomi Islam

Hendra Eka Saputra[1], Zulkifli[2], Budi Hermanto[3], Ashar Jenny Wananda[4], Dela Luthfia[5]
[(1,2,3,4,5)]Universitas Islam Riau, Indonesia
e-mail: **hendraekasaputra@fis.uir.ac.id**

Diterima: 17-06-2025 Direvisi : 18-06-2025 Disetujui : 18-07-2025 Diterbitkan : 18-07-2025

Abstrak
Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat pembangunan di Indonesia. Dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi kepada generasi muda. Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepala sekolah tentang pentingnya nilai-nilai antirosuah (antikorupsi) dalam tata kelola pendidikan. Sosialisasi ini diadakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu dengan peserta kepala sekolah tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Metode kegiatan meliputi ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, serta pelatihan teknis dalam implementasi kebijakan transparansi di sekolah. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip antikorupsi, implementasi kebijakan transparansi, dan penguatan sistem pengawasan internal di sekolah masing-masing. Berdasarkan survei kepuasan peserta, 95% menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, dan 80% peserta menyatakan komitmennya untuk menerapkan nilai-nilai integritas di sekolah mereka. Dengan adanya program ini, diharapkan kepala sekolah mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya integritas di lingkungan pendidikan.
Kata kunci: Antirosuah, Pendidikan, Kepala Sekolah, Transparansi, Integritas

Abstract
Corruption is one of the main problems that hinder development in Indonesia. The world of education has a strategic role in instilling the values of integrity and anti-corruption to the younger generation. Therefore, this community service program aims to increase the awareness and understanding of school principals about the importance of anti-rosuah (anti-corruption) values in education governance. This socialization was held at the Rokan Hulu Regency Education Office with participants from kindergarten, elementary, junior high, and high school principals. The activity methods included lectures, interactive discussions, case studies, and technical training in implementing transparency policies in schools. The evaluation results showed an increase in participants' understanding of anti-corruption principles, implementation of transparency policies, and strengthening internal monitoring systems in their respective schools. Based on a participant satisfaction survey, 95% stated that this activity was very useful, and 80% of participants expressed their commitment to implementing integrity values in their schools. With this program, it is hoped that school principals will be able to become agents of change in building a culture of integrity in the educational environment.
Keywords*: Anti-Corruption, Education, Principal, Transparency, Integrity*

A. PENDAHULUAN

Sosialasi Anti Rasuah Dan Dampak Rasuah di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu di Tinjau dari Sudut Pandang Ekonomi Islam Korupsi adalah masalah yang menjadi perhatian global dan menjadi masalah yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Walaupun

dalam setiap negara memiliki kasus korupsi yang berbeda beda, kasus ini menjadi hal yang akan selalu diupayakan oleh masing masing negara supaya perkaranya dapat dihindari sebisa mungkin. Di negara kita sudah sering terdengar perihal tindak pidana korupsi. Hal ini tercatat dalam laman Kompas Indonesia pada Januari 2023, bahwa negara Indonesia mengalami penurunan skor dari 102 ke angka 110 dari 180 negara yang disurvei. Posisi ini sama hal nya dengan negara Bosnia dan Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leon. Sedangkan di Asia Tenggara menempati rank ke 7 dari 11 negara yang ada. (Saptohutomo, 2023).

Pendidikan menjadi jalan untuk membina potensi manusia sebagai manusia yang paripurna untuk diri dan lingkungannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamiyati Gani Ali, bahwa pendidikan adalah proses mempersipakan masa depan anak didik dalam meraih tujuan hidup. (Ali, 2008) Pendidikan merupakan salah satu upaya atau cara yang digunakan untuk memerangi korupsi. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan tempat para generasi muda belajar dan menimba ilmu yang luas, terutama mengenai penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dan salah satunya adalah nilai pendidikan antikorupsi. Pendidikan merupakan suatu proses dimana seorang siswa mengalami pembentukan kepribadian dan perubahan sikap mental, maka ada baiknya diterapkan pendidikan anti korupsi pada diri seorang siswa.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan dan surat edaran pada tanggal 30 Juli 2012, nomor 1016/E/t/2012 yang telah didistribusikan ke seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta (Kopertis wilayah I ke wilayah XII) tentang surat edaran terkait penyelenggaraan pendidikan antikorupsi. Kebijakan sirkular tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Strategi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dipilih untuk memfasilitasi atau membantu siswa mencapai tingkat belajar tertentu.

Korupsi adalah masalah besar disamping narkotika, korupsi terbukti melemahkan demokrasi dan akses terhadap keadilan. Berdasarkan data dari Transparancy International negara Indonesia mendapat skor 40 (skala 1-100) kemudian skor mengalami penurunan menjadi 34 di tahun 2022 sampai 2023 ini menunjukkan kita terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. Untuk itu perlu ada terobosan khusus dalam dunia pendidikan yang membantu menghasilkan insan yang anti korupsi yang mulai ditanamkan sejak dini dimulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sampai tingkat perguruan tinggi. Pendidikan salah satu tujuannya membentuk karakter yang berakhlak mulia salah satunya adalah membangun sikap jujur. Jelas kejujuran sebagai nilai nurani perlu ditanamkan sejak awal baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Kata jujur juga menjadi poin utama atau urutan pertama ditulis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu perlu dilaksanakan sosialasi anti Rasuah dan dampak Rasuah kepada kepala sekolah TK sampai SMA/Sederajat se Rokan Hulu sebagai wadah pemberdayaan pendidik untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Untuk menerapkan pembelajaran anti korupsi maka perlu dipersiapkan mulai dari calon dan tenaga pendidik. Pendidikan seharusnya mampu menciptakan generasi yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, akhlak yang terpuji serta dapat menguasai teknologi. Pembelajaran yang berorientasi pada karakter Anti Korupsi akan membantu siswa memahami sifat Korupsi, akibat yang ditimbulkannya, serta pentingnya pencegahan Korupsi dalam membangun masyarakat yang adil dan berintegritas.

Menurut Prasetyowati, dkk (2022) bahwa pendidikan karakter anti-korupsi adalah upaya untuk membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang menolak serta melawan korupsi dalam masyarakat. Implementasi pendidikan karakter anti-korupsi dalam pembelajaran merupakan langkah penting dalam menciptakan generasi yang integritas dan bertanggung jawab. Ini dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, studi kasus, dan kegiatan praktik yang membangun kesadaran akan risiko korupsi dan cara mengatasinya. Pendidik memiliki peran kunci dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum dan menjadi teladan dalam praktek sehari-hari. Sekolah juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter anti-korupsi. Evaluasi terhadap efektivitas program pendidikan karakter anti-korupsi dan pemantauan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan implementasi program. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta generasi yang memiliki kesadaran moral yang tinggi dan kemampuan untuk melawan korupsi.

Praktik korupsi yang terjadi di dunia pendidikan sangatlah berdampak buruk bagi banyak pihak, termasuk generasi penerus bangsa. Bentuk korupsi dalam dunia pendidikan sangat beragam, seperti penyelewengan dana, suap, nepotisme, kecurangan dalam ujian, dan pungutan liar yang

terjadi karena sistem yang kompleks, kurangnya transparansi, dan lemahnya penegakan hukum. Hal itu akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan. Maka dari itu upaya-upaya pencegahan harus dilaksanakan dengan berbagai cara agar dapat meminimalisasikan praktik korupsi khususnya pada dunia pendidikan (Fajar, M., & Azhar, Z. (2019).

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasir Pengaraian. Kabupaten ini telah dijuluki sebagai Negeri Seribu Suluk yang artinya menjalankan kedisiplinan dalam menjalankan aturan-aturan agama Islam. Banya terdapat suluk atau masjid yang berdiri di kabupaten ini. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan potensi permasalahan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu bahwa belum adanya sosialisasi ataupun pembelajaran langsung tentang Anti Korupsi yang secara mendetail serta penerapan secara langsung mengenai penanganan Anti Korupsi kepada kepala sekolah TK sampai SMA/Sederajat se Rokan Hulu. Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan adanya kegiataan pengajaran yang mendetail serta pengarahan bagaimana cara menangani nilai anti korupsi yang biasanya dilakukan dilingkungan sekolahan, membahas dan menjelaskan serta menerapkan bahkan mengamalkan tentang Anti Korupsi secara mendalam dan mendetail. langkah-langkah dan penanganan tentang Korupsi yang baik dan benar.

Keterlibatan kepala sekolah TK sampai SMA/Sederajat se Rokan Hulu dalam upaya pencegahan korupsi memiliki kedudukan yang sangat strategis. Sejalan dengan pandangan progresivisme, Pendidik adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada siswa dalam banyak hal, termasuk masalah korupsi. Pendidik memiliki peran dan posisi yang strategis untuk menjadi agen of change di tengah tengah masyarakat dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi. Kabupaten Rohul menjadi strategis dalam upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, hal ini disebabkan kabupaten ini telah dijuluki sebagai Negeri Seribu Suluk yang artinya menjalankan kedisiplinan dalam menjalankan aturan-aturan agama Islam. Akan tetapi dari data lapangan yang didapati bahwa pendidik ini banyak tidak mengetahui hal-hal dasar tentang karakter anti korupsi, mereka cenderung tidak tertarik dan tidak berminat membicarakan mengenai karakter anti korupsi, begitu juga dengan para siswa, masih ada pendidik yang kurang tertarik dengan kurikulum karakter anti korupsi, mereka beranggapan bahwa pencegahan korupsi hanya merupakan tangungjawab dari pemerintahan saja. Kondisi ini tentu saja perlu mendapat perhatian khusus dari dunia pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi dan dinas pendidikan, walaupun kita tahu bahwa setiap kebijakan baru yang diluncurkan akan selalu mendapat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka diperlukan sosialisasi ataupun pembelajaran langsung tentang Anti Korupsi yang secara mendetail serta penerapan secara langsung mengenai penanganan Anti Korupsi kepada kepala sekolah TK sampai SMA/Sederajat se Rokan Hulu. Melalui kegitan ini paling tidak dapat mensosialisasikan program pemerintah mengenai keterlibatan civil society dalam pencegahan korupsi di tingkat lokal.

Kegiatan ini bertumpu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif sehingga dalam pelaksanaannya harus melibatkan aktivis pendidik sebagai partner. Oleh karena itu, pendidik harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut.
2. Tingkat kesadaran para pendidik merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi pendidikan antikoupsi yang dipelopori terlebih dahulu oleh para kepala sekolah, karena kita tahu bahwa pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi suatu perubahan yang diharapkan.

Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan kesadaran aktivis para pendidik terhadap pendidikan antikorupsi pada khususnya. Untuk itu, perlu perencanaan dan langkah-langkah yang riil untuk mencapai target yang ditetapkan melalui indikator capaian yang dirancang. Dengan adanya kegiatan ini akan membuat para pendidik termotivasi menjadi contoh yang baik di Sekolah, terbentuknya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kegigihan, kepedulian, disiplin, kreatif, kebersamaan, kesederhanaan sehingga semakin banyak pendidik yang terpuji di Rohul khususnya. Kegiatan ini akan menghasilkan adanya penyamaan persepsi di kalangan para pendidik bahwa tugas pencegahan korupsi tidak saja merupakan tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi juga menjadi tangungjawab bersama. Serta terbentuknya komunitas pendidik anti korupsi di tingkat Kabupaten Rohul.Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang

terkait dengan masalah yg diselesaikan, kajian tentang penelitan dan atau kegiatan pengabdian pada masyarakat yang pernah dilakukan sebelumnya oleh pengabdi lain atau pengabdi sendiri yang relevan dengan tema kegiatan pengabdian yang dilakukan. Di pendahuluan harus ada kutipan dari hasil penelitian/pengabdian lain yang menguatkan pentingnya PKM.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di dinas pendidikan Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan dilaksanakan dari bulan Oktober 2024. Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah TK sampai SMA/Sederajat se Rokan Hulu berjumlah 100 orang. Ada berapa metode dalam pengabdian ini, yaitu:

1. Metode Ceramah : Metode ceramah ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang korupsi dan aspek-aspeknya, penyebab dan dampak korupsi, upaya perlawanan terhadap korupsi, pentingnya budaya anti korupsi bagi pendidikan, implementasi budaya anti korupsi bagi mahasiswa
2. Metode Tanya Jawab : Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan pada saat menerima penjelasan tentang materi, dengan metode ini memungkinkan mahasiswa menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang pendidikan karakter anti korupsi
3. Metode Simulasi : Metode simulasi ini sangat penting diberikan kepada para peserta pelatihan untuk memberikan ksempatan mempraktekan materi pelatihan yang diperoleh.

Harapannya, peserta pelatihan akan benar-benar menguasai materi pelatihan yang diterima, mengetahui tingkat kemampuannya menerapkan kegiatan yang mendukung program pemberantasan korupsi dan program pendidikan karakter anti korupsi secara tehnis dan kemudian mengidentifikasi kesulitan-kesulitan (jika masih ada) untuk kemudian dipecahkan secara bersama-sama

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa:

1. 90% peserta memahami konsep dasar antirosuah setelah mengikuti sosialisasi.
2. 85% peserta merasa lebih percaya diri dalam mengimplementasikan kebijakan transparansi di sekolah mereka.
3. 80% peserta menyatakan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai integritas dalam pengelolaan sekolah.
4. Beberapa sekolah mulai menerapkan sistem pelaporan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi keuangan dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.
5. Tantangan utama dalam penerapan kebijakan antirosuah di sekolah meliputi resistensi dari beberapa pihak yang terbiasa dengan sistem lama serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif.

Sebagai hasil dari program ini, beberapa peserta mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus di tingkat sekolah yang bertanggung jawab dalam memastikan kebijakan antirosuah dapat berjalan dengan baik.

Gambar 1. Penjelasan mengenai Antirosuah di dinas pendidikan kab Rokan Hulu, Riau

Gambar 2. Fhoto bersama peserta dan tim PKM serta pihak Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, Riau

D. SIMPULAN

Sosialisasi antirosuah ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepala sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas. Rekomendasi untuk keberlanjutan program ini meliputi: Penyediaan modul pelatihan yang dapat diakses secara mandiri oleh kepala sekolah, termasuk materi dalam bentuk video dan infografis. Pembentukan forum diskusi berkala sebagai

wadah berbagi pengalaman dan strategi penerapan kebijakan antikorupsi. Peningkatan kerja sama antara dinas pendidikan, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam penguatan sistem pengawasan pendidikan. Implementasi sistem pengaduan online yang dapat digunakan oleh guru, siswa, dan orang tua untuk melaporkan indikasi praktik koruptif di lingkungan sekolah. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) terkait transparansi keuangan sekolah yang wajib diterapkan di semua tingkat pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan upaya pencegahan korupsi di sektor pendidikan semakin efektif dan berkelanjutan, serta mampu membangun ekosistem pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel.

E. SARAN

Agar program ini lebih efektif dan memberikan dampak jangka panjang, beberapa saran yang dapat diimplementasikan antara lain:

1. Penguatan Program Pelatihan Berkelanjutan, Mengadakan pelatihan antirosuah secara berkala untuk memastikan pemahaman peserta tetap diperbarui sesuai dengan regulasi terbaru.
2. Pembuatan Panduan Praktis, Menyusun buku panduan atau modul yang berisi praktik terbaik dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan sekolah.
3. Pembentukan Tim Pengawas Internal, Setiap sekolah sebaiknya memiliki tim internal yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi kebijakan antirosuah dan melaporkan potensi penyimpangan.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Antikorupsi, Meningkatkan kerja sama dengan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau LSM antikorupsi untuk memberikan bimbingan teknis lebih lanjut.
5. Peningkatan Peran Masyarakat, Melibatkan orang tua siswa dan komite sekolah dalam pengawasan dana pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan.

   Dengan langkah-langkah ini, diharapkan upaya pencegahan korupsi di sektor pendidikan semakin efektif dan berkelanjutan, serta mampu membangun ekosistem pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih kepada Kabupaten Rokan Hulu sebagai mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini, kemudian kepada seluruh kepala sekolah baik di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA sebagai peserta dari kegiatan ini, serta Direktorat Penelitan dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Saptohutomo, A. P. (2023). Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia. Indonesia: Kompas.com.

Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. Jurnal Visi Komunikasi, Number 14 Volume 2, 285–301.

Ali, H. G. (2008). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta, Indonesia: Quantum Teaching Ciputat Press Group.

Fajar, M., & Azhar, Z. (2019). Indeks Persepsi Korupsi Dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Tenggara. Jurnal Ecogen, 1(3), 681. https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.5114

Prasetyowati, N. T., Sutoyo, & Supeni, S. (2022). Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam Rangka Penguatan Nilai Karakter Kejujuran pada Peserta Didik. Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 11(2), 47.

Arwani, A. (2016). Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebasis Akuntansi Syariah. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2(2).
https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.279